

# LAPORAN TINDAK LANJUT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA



Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



Website : [www.pn-pangkalanbalai.go.id](http://www.pn-pangkalanbalai.go.id)  
Email : [pn.pangkalanbalai@gmail.com](mailto:pn.pangkalanbalai@gmail.com)

## LAMAT:

komplek Perkantoran Terpadu Pemda banyuasin. Jl. Lintas  
Sumatera Palembang-Betung, Kab. Banyuasin. Prov.  
Sumatera Selatan



# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan taufik dan hidayah-Nya, atas izinNya "*Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai*" telah disusun, sebagai upaya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi akuntabilitas kinerja di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Laporan Tindak Lanjut Atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai disusun berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 November 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan Nomor : W6-U/4661/OT.01.1/XII/2022

Rencana aksi tindak lanjut hasil akuntabilitas dibuat berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Secara umum penerapan hasil implementasi akuntabilitas kinerja telah berhasil dilaksanakan dan dicapai dengan sangat baik yang mana pada surat tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memperoleh predikat BB (Sangat baik) dengan perolehan nilai 70,55. Capaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2021 ini tidak terlepas dari dukungan seluruh sumber daya manusia Pengadilan Negeri Pangkalan Balai baik bidang teknis maupun non teknis. Melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan baik perbaikan pelaksanaan maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Palembang, 28 Desember 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



**SILVI ARIANI, S.H., M.H**  
19760929 200112 2 006

# DAFTAR HALAMAN

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR HALAMAN .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1
C. Ruang Lingkup.....	2
BAB II MONITORING DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA.....	3
A. Perkembangan dan Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021.....	3
B. Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021.....	3
BAB III PENUTUP.....	22
A. KESIMPULAN.....	22
B. SARAN.....	23
LAMPIRAN.....	24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) bahwa pemerintah yang akuntabel dapat terlihat mulai dari kualitasnya sistem perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya sistem evaluasi kinerja internal. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja instansi pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Dimana komponen yang dinilai ataupun dievaluasi meliputi : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Dalam memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang maka diperlukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap Hasil Evaluasi Kinerja agar sasaran dan target dalam indikator kinerja dapat tercapai sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

### B. Tujuan

Monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Mengidentifikasi rencana aksi tindak lanjut terhadap rekomendasi peningkatan akuntabilitas kinerja di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;



3. Memastikan hasil evaluasi telah ditindak lanjuti oleh masing-masing tim pelaksana;

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Ruang lingkup atas tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP mencakup:

1. Tindak lanjut atas rekomendasi terhadap aspek Perencanaan Kinerja;
2. Tindak lanjut atas rekomendasi terhadap aspek Pengukuran Kinerja;
3. Tindak lanjut atas rekomendasi terhadap aspek Pelaporan Kinerja;
4. Tindak lanjut atas rekomendasi terhadap aspek Evaluasi Internal;
5. Tindak lanjut atas rekomendasi terhadap aspek capaian kinerja.

## BAB II

# MONITORING DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Perkembangan dan Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021

Berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 November 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan Nomor : W6-U/4661/OT.01.1/XI/2022, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memperoleh nilai **70,55 dengan predikat BB (Sangat baik)**. Perkembangan dan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri pangkalan Balai yang didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Pengadilan Tinggi Palembang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN /SUB KOMPONEN/ KRITERIA	BOBOT	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
			2021
1	Perencanaan Kinerja	30.00	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16,55
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,55
Predikat			<b>BB (Sangat Baik)</b>

### B. Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021 terdapat 12 (dua belas) rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi;

1. Perencanaan Kinerja : 3 (tiga) rekomendasi;
2. Pengukuran Kinerja : 3 (tiga) rekomendasi
3. Pelaporan Kinerja : 3 (tiga) rekomendasi;



4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: 3 (tiga) rekomendasi

Berikut perinciannya:

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
<b>A. Perencanaan Kinerja</b>		
1	Pada pengelolaan dokumen perencanaan kinerja	
	<p>a. Agar segera disusun pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antara lain kebijakan penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja;</p> <p>b. Agar segera disusun Surat Keputusan mengenai penetapan dokumen rencana strategis satker;</p> <p>c. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan harap dilengkapi dengan nomor dokumen;</p> <p>d. Agar melampirkan Dokumen Program Kerja/Rencana aksi yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai</p>	<p>a. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk kedepannya akan menyusun pedoman mengenai pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antara lain kebijakan penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja untuk penyempurnaan pelaporan SAKIP untuk periode berikutnya;</p> <p>b. Surat keputusan mengenai penetapan dokumen rencana strategis satker telah disusun (terlampir);</p> <p>c. Sebagai perbaikan dan penyempurnaan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, kedepannya dilengkapi nomor dokumen sehingga lebih memudahkan dalam memeriksa dan penilaian;</p> <p>d. Untuk dokumen Program Kerja/Rencana Aksi aparatur</p>

		<p>Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah di buat dan ditandatangani oleh para aparatur yang bersangkutan serta telah di tandatangi oleh ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mana kedepannya juga akan disertakan untuk SAKIP 2022 mengenai lapiran dokumen Program Kerja/Rencana Aksi</p>
2	<p>Dokumen Perencanaan Kinerja agar memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja SMART, menggunakan penyelarasan (<i>crosscutting</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>), serta agar;</p> <p>a. Harap dilakukan revisi Dokumen Perencanaan Kinerja agar menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai melalui pohon kinerja (bagi habis berjenjang) menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)</p> <p>b. Dokumen Cetak Biru Mahkamah Agung harap dipublikasi di website sakter</p> <p>c. Membuat analisa dokumen cetak biru MA, renstra, RKT, PKT</p>	<p>a. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melakukan revisi Dokumen Perencanaan Kinerja sehingga menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yg perlu dicapai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mana akan selalu dilakukan secara periodik dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan (dokumen reuiu RKT terlampir)</p> <p>b. Dokumen cetak biru telah dipublikasikan ke dalam website satker ;<a href="http://www.pn-pangkalanbalai.go.id">www.pn-pangkalanbalai.go.id</a> (screenshot terlampir)</p> <p>c. Dalam penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja kedepannya akan memuat analisa dokumen cetak biru MA, renstra, RKT, PKT</p> <p>d. Target yang ditetapkan dalam</p>



<p>d. Target yang ditetapkan dalam perencanaan Kinerja harap disesuaikan agar tercipta target ideal/baik memenuhi seluruh kriteria sebagai kinerja yang baik yaitu dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis. Adapun target yang kurang menantang dan realistis pada indikator kinerja: presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu, presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dan persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;</p> <p>e. Melampirkan SKP seluruh pegawai. Selain itu perlu dijabarkan secara berjenjang hubungan yang berkesinambungan dan selaras dengan tujuan organisasi dengan kinerja individu (cascading) dan membuat pohon kinerja yang menggambarkan perencanaan</p>	<p>perencanaan Kinerja disesuaikan agar tercipta target ideal/baik memenuhi seluruh kriteria sebagai kinerja yang baik yaitu dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis yang mana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menginputnya dan menyesuainya pada aplikasi komdanas dan telah menuangkannya ke dalam reviu rencana kerja tahunan (reviu RKT 2022) (capture screen komdanas dan e-Sakip terlampir)</p> <p>e. Untuk penyusunan dan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja akan lebih dilengkapi dengan salah satunya melampirkan SKP seluruh pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai</p>
--	---

	kinerja organisasi (sesuai dengan Permenpan RB No.89 Tahun 2021)	
3	<p>Dalam perencanaan Kinerja:</p> <p>a. Agar segera menyusun analisis dokumen matriks pendanaan dan RKA-KL mengenai anggaran yang ditetapkan apakah telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;</p> <p>b. Agar segera menyusun analisis serta monitoring dan evaluasi SOP;</p> <p>c. Agar segera menyusun analisis dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT);</p> <p>d. Agar segera menyusun laporan periodik atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun secara berkala dan analisa perbaikan dari kinerja sebelumnya</p>	<p>a. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai segera menyusun analisis dokumen matriks pendanaan dan RKA-KL mengenai anggaran yang ditetapkan sehingga dapat mengetahui apakah telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai salah satunya melalui cetak laporan pada aplikasi SAKTI. Kemenkeu (Rka K/L, DIPA Petikan terlampir)</p> <p>b. Untuk menyusun analisis serta monitoring dan evaluasi SOP yaitu dengan selalu mengisi secara periodik aplikasi LLK pada aplikasi Simari.mahkamahagung.go.id</p> <p>c. Untuk memastikan dan memonitoring berjalannya program tahunan maka dibutuhkannya alat kontrol salah satunya adanya rencana kerja tahunan beserta reuiu secara periodik dengan tidak lupa mengakselarasinya dengan pengisian Emonev Smart.DJA secara periodik (capture screen RKT, Reuiu RKT dan pengisian Emonev Smart.DJA terlampir)</p> <p>d. Laporan periodik atas</p>



		<p>pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja haruslah sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilakukan perbaikan atau revisi salah satunya yaitu dengan selalu melakukan kontrol pada pengisian emonev Bappenas, Smart DJA serta melakukan reuiu RKT secara tepat waktu dan periodik serta tidak lupa juga dengan pengisian aplikasi e-Sakip baik itu dalam hal pelaporan maupun adanya revisi pada dokumen (capture screen e-Sakip terlampir)</p>
<b>B. Pengukuran Kinerja</b>		
1	<p>Pada pengukuran kinerja yang telah dilakukan, agar;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Segera menyusun Surat keputusan pedoman teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal/waktu pelaksanaan dan pengukuran data kinerja</li> <li>b. Segera menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja yang sekurang-kurangnya mengatur apabila terjadi kesalahan pengimputan data, serta menyiapkan jadwal monitoring dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk melaksanakan atau sebagai pedoman teknis pengumpulan data kinerja yang mana mencakup mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal/waktu pelaksanaan dan pengukuran data kinerja perlu adanya surat keputusan dari pimpinan sebagai pedoman dilapangan. Maka dari itu kedepan sebelum pengumpulan data kinerja tersebut ditindak lanjuti untuk kedepan segera di susun surat keputusan mengenai teknis dilapangan dengan terlebih</li> </ol>

	<p>evaluasi pengukuran kinerja sesuai rencana aksi;</p>	<p>dahulu berkoordinasi dengan pimpinan</p> <p>b. Mekanisme pengumpulan data kinerja sudah berjalan sebagaimana mestinya yaitu dengan penyerahan data laporan bulanan Survei Kepuasan Masyarakat per Triwulan dari kepaniteraan hukum ke Sub. Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan. Dan juga hasil laporan tersebut dipublikasikan kedalam website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai</p>
2	<p>Agar Pengukuran Kinerja menjadi kebutuhan maka perlu dilakukan;</p> <p>a. Pembuatan dokumen rapat monev capaian kinerja secara berkala sehingga terdapat gambar bahwa pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur kinerja;</p> <p>b. Analisa pengumpulan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan telah dilakukan secara berkala;</p> <p>c. Pemantauan atas pengukuran kinerja periodik (berkala) pada setiap level secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai (bawahannya)</p>	<p>a. Agar Pengukuran Kinerja menjadi kebutuhan maka kedepan perlu adanya rapat monitoring dan evaluasi secara periodik yang mana juga melibatkan unsur pimpinan didalamnya</p> <p>b. Salah satu mekanisme dalam pengumpulan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan dilakukan secara berkala antara lain melalui Pengisian Emonev DJA, Emonev Bappenas, atau juga monitoring melalui aplikasi SAKTI. Kemenkeu pada menu laporan. Hal tersebut dilakukan secara periodik oleh operator</p>

		<p>laporan dengan melibatkan unsur pimpinan didalamnya. Selain itu juga Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga secara periodik menginput laporan SAKIP kedalam aplikasi e-Sakip (Screenshot terlampir)</p> <p>c. Survey indeks kepuasan layanan telah dilaksanakan secara tertib pertriwulan melalui aplikasi SI_SUPER. . dalam laporan survey IKM tersebut juga sudah melakukan monitoring dan evaluasi terutama untuk tiga unsur terendah dan hasil atau laporan tersebut dipublikasikan ke website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Selain itu agar berjalannya pemantauan atas pengukuran kinerja maka dibutuhkannya monitorong secara berjenjang dan periodik seperti diadakannya rapat tiap bulannya, selain itu pengisian secara periodik capaian kinerja pada aplikasi Emonev DJA, Emonev Bappenas, laporan kinerja pada SAKIP Kemenkeu sehingga menjadi bahan kebijakan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan atau kebijakan.</p>
--	--	--

3	<p>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pengukuran kinerja secara formal selain menjadi dasar dalam pemberian/pengukuran tunjangan kinerja, juga sebagai dasar dalam pemberian reward/punishment, melampirkan dokumen rekapitulasi pengajuan tunjakin 3 bulan terakhir dan dokumen PKP seluruh pegawai;</li> <li>b. Mengoptimalkan hasil atas pengukuran kinerja digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur;</li> <li>c. Melampirkan dokumen rapat intern menindaklanjuti hasil pengawasan daerah dan evaluasi kinerja dan dokumen reuiu SOP;</li> <li>d. Melengkapi dokumen surat pengantar, SPTJM, matriks semula menjadi, serta surat persetujuan revisi anggaran dari eselon (jika ada)</li> <li>e. Membuat analisa efisiensi;</li> <li>f. Melampirkan dokumen rapat capaian kinerja secara berkala agar dapat diketahui pemahaman dan kepedulian satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengukuran kinerja telah dijadikan sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien yang mana salahsatunya melalui pengukuran kinerja secara formal selain menjadi dasar dalam pemberian/pengukuran tunjangan kinerja, juga sebagai dasar dalam pemberian reward/punishment. Untuk penyusunan dokumen pengukuran kinerja akan lebih menyempurnakan dengan menyertakan dokumen rekapitulasi pengajuan tunjakin 3 (tiga) bulan terakhir dan dokumen PKP seluruh pegawai</li> <li>b. Sebagai salah satu dasar pengukuran kinerja yang mana digunakan sebagai pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai maka kedepannya akan lebih mengoptimalkan fungsi dan hasil pengukuran kinerja tersebut bagi tiap aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang akan di promosikan</li> </ol>
---	---	--



	<p>g. Melampirkan SKP seluruh pegawai;</p>	<p>atau di mutasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan</p> <p>c. Menjadikan pengukuran kinerja secara formal selain menjadi dasar dalam pemberian/pengukuran tunjangan kinerja, juga sebagai dasar dalam pemberian reward/punishment, kedepnya melampirkan melampirkan dokumen rapat intern menindaklanjuti hasil pengawasan daerah dan evaluasi kinerja dan dokumen reuiu SOP yang mana secara garis besar yaitu adanya penyempurnaan atau penambahan dari dokumen</p> <p>d. Untuk penyusunan pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kedepannya akan melengkapi dokumen surat pengantar, SPTJM, matriks semula menjadi, serta surat persetujuan revisi anggaran dari eselon (jika ada) sehingga dokumen tersebut lebih akuntable dan sempurna</p> <p>e. Dalam penyusunan pengukuran kinerja kedepannya akan menyajikan analisa efisiensi sebagai penyempurnaan dokumen ;</p> <p>f. Dalam penyempurnaan</p>
--	--	--

		<p>penyusunan pengukuran kinerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kedepannya melampirkan dokumen rapat capaian kinerja secara berkala agar dapat diketahui pemahaman dan kepedulian satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja secara periodik dan berketerusan</p> <p>g. Dalam penyempurnaan penyusunan pengukuran kinerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kedepannya melampirkan SKP seluruh pegawai sebagai bahan lapiran yang mana juga berguna sebagai bahan referensi bagi tim penilai dan juga pimpinan dalam menentukan kebijakan</p>
<b>C. Pelaporan Kinerja</b>		
1	Agar dokumen laporan menggambarkan kinerja:	
	<p>a. Dokumen LKjIP harap diformalkan dalam bentuk Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;</p> <p>b. Dokumen LKjIP harap dilengkapi dengan informasi kualitatif dan analisa kualitatif dan data didukung dokumen pernyataan pelaksanaan telah direviu internal atau melalui dokumen hasil pelaksanaan reviu seperti catatan hasil reviu atau</p>	<p>a. Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah diformalkan dengan adanya Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (terlampir)</p> <p>b. Untuk penyusunan LKjIP akan lebih lengkap dengan informasi kualitatif dan analisa kualitatif dan data didukung dokumen</p>

	<p>melalui review sheet yang memastikan pengujian atas keandalan data dan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;</p> <p>c. Agar melampirkan surat pengantar dan bukti ekspedisi pengiriman dokumen SAKIP;</p>	<p>pernyataan pelaksanaan telah direviu internal atau melalui dokumen hasil pelaksanaan revidu seperti catatan hasil revidu atau melalui review sheet yang memastikan pengujian atas keandalan data dan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;</p> <p>c. Dalam penyampaian dokumen SAKIP, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menyertakan Surat Pengantar serta bukti ekspedisi (terlampir)</p>
2	<p>Pada dokumen laporan kinerja agar memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, yakni:</p> <p>a. Membuat perbaikan dokumen LKjIP satker dan Permenpan Nomor 53 tahun 2014;</p> <p>b. Mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dalam periode Renstra (jangka menengah) pada dokumen LKjIP satker;</p> <p>c. Mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada dokumen LKjIP satker;</p> <p>d. Mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja (<i>benchmark</i>) di level</p>	<p>Dalam penyusunan dokumen laporan kinerja haruslah memenuhi standar sehingga menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan</p> <p>a. Dalam pengusunan Laporan Kinerja perlu adanya revidu sehingga dapat lebih sistematis dan akuntabel. Dalam penyusunan revidu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah di tuangkan atau dilaporkan melalui aplikasi e-Sakip dan Komdanas</p> <p>b. Pada LKjIP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah mencantumkan perbandingan</p>

<p>nasional (bandingkan dengan ukuran capaian rata-rata nilai LKjIP pada satker di wilayah)</p> <p>e. Mencantumkan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada dokumen LKjIP satker;</p> <p>f. Membuat analisis atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;</p> <p>g. Mencantumkan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah perbaikan pada dokumen LKjIP satker</p>	<p>realisasi kinerja dalam periode Renstra (jangka menengah) pada dokumen LKjIP satker</p> <p>c. Dalam penyempurnaan dokumen LKjIP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kedepannya akan mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya</p> <p>d. Dalam penyempurnaan dokumen LKjIP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kedepannya akan Mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja (<i>benchmark</i>) di level nasional (bandingkan dengan ukuran capaian rata-rata nilai LKjIP pada satker di wilayah)</p> <p>e. Dalam penyempurnaan dokumen LKjIP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kedepannya Mencantumkan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada dokumen LKjIP satker</p> <p>f. Dokumen LKjIP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menyajikan analisis atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;</p>
--	--



		g. Dokumen LKJIP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah Mencantumkan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah perbaikan pada dokumen LKjIP satker
3	<p>Dalam upaya pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, agar:</p> <p>a. Melengkapi dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (rapat rutin bulanan) dengan dipimpin langsung oleh pimpinan dan melibatkan seluruh pegawai;</p> <p>b. Melengkapi dengan penjelasan apakah informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian aktivitas melalui reviu/revisi SOP dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;</p> <p>c. Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja</p> <p>d. Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;</p> <p>e. Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian</p>	<p>Dalam upaya pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kedepannya akan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melengkapi dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (rapat rutin bulanan) dengan dipimpin langsung oleh pimpinan dan melibatkan seluruh pegawai</li> <li>❖ Melengkapi dengan penjelasan apakah informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian aktivitas melalui reviu/revisi SOP dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;</li> <li>❖ Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja</li> <li>❖ Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala digunakan dalam evaluasi</li> </ul>

	<p>perencanaan kinerja yang kan dihadapi berikutnya;</p> <p>f. Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala perubahan budaya kinerja organisasi.</p>	<p>pencapaian keberhasilan kinerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang kan dihadapi berikutnya;</li> <li>❖ Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala perubahan budaya kinerja organisasi.</li> </ul>
<b>D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>		
1	<p>Terhadap Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal yang telah dilaksanakan, agar:</p> <p>a. Dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja per bagian pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;</p> <p>b. Melengkapi dokumen laporan evaluasi akuntabilitas kinerja per bagian yang mengindikasikan mekanisme pengumpulan data kinerja SOP secara berjenjang dari staf hingga ke pimpinan satker sehingga dapat menggambarkan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan secara berjenjang</p>	<p>a. Berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor :W6-U/4661/OT.01.1/XI/2022 Tanggal 30 November 2022 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja maka segera dilakukan rapat evaluasi per bagian yang melibatkan juga pimpinan didalamnya sehingga hasil tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja segera ditindak lanjuti</p> <p>b. Dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja akan lebih menyempurnakan dengan Melengkapi dokumen laporan evaluasi akuntabilitas kinerja per bagian yang mengindikasikan mekanisme</p>

		pengumpulan data kinerja SOP secara berjenjang dari staf hingga ke pimpinan satker
2	<p>Untuk mewujudkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan oleh SDM yang kompeten, diharapkan;</p> <p>a. Agar segera disusun dokumen analisis atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari semua pengampuk PK;</p> <p>b. Terhadap hakim dan aparatur Pengadilan Negeri pangkalan Balai yang menyusun dan/atau mengevaluasi Kinerja Internal dapat diusulkan memperoleh pelatihan SAKIP agar penyusunan dan evaluasi AKIP sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas oleh sumber daya yang memadai dan kompeten atau dapat dilaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dengan narasumber pegawai yang sudah mendapat sertifikasi SAKIP</p> <p>c. Melengkapi bukti screenshot aplikasi e-reviu SAKIP Menpan</p>	<p>a. Sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor :W6-U/4661/OT.01.1/XI/2022 Tanggal 30 November 2022 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja maka sesegera mungkin Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menindak lanjuti surat tersebut dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan yang mana hasil tindak lanjut tersebut dibuktikan dengan surat pengantar dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan juga bukti ekspedisi pengiriman serta mempublikasikannya ke website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai</p> <p>b. Bahwasanya hingga saat ini Desember 2022 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai belum memiliki hakim dan aparatur yang memiliki sertifikasi SAKIP, yang mana kedepannya segera diusulkan nama-nama untuk pengusulan pelatihan SAKIP</p> <p>c. Bahwasanya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah</p>

		menginput data SAKIP pada aplikasi e-reviu SAKIP Menpan (terlampir pada akhir laporan)
3	Untuk meningkatkan Implementasi SAKIP yang memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja, diharapkan: agar segera dilakukan evaluasi internal secara berkala yang dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi internal beserta tindak lanjutnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bahwasanya untuk pelaporan sakip telah di publikasikan melalui website <a href="http://www.pn-pangkalanbalai.go.id">www.pn-pangkalanbalai.go.id</a> pada menu Layanan Publik</li> <li>❖ Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menginput data Sakip/reviu Sakip pada aplikasi Komdanas, Eleksi dan e-Reviu SAKIP Menpan</li> <li>❖ Pengadilan Neger Pangkalan Balai segera melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja berdasarkan rekomendasi dari Pengadilan Tinggi Palembang</li> </ul>



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut;

1. Pelaksanaan tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai disusun berdasarkan pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Perdilan di Bawahnya pada Bab IV “tindak Lanjut Evaluasi” Pasal 7 ayat 1: “semua unit wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dalam jangk waktu paling lama sebelum melaksanakan evaluasi pada tahun berikutnya”.
2. Setiap rekomendasi yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Palembang telah dibuat rencana aksi tindak lanjutnya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaannya
3. Pelaksanaan tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai disusun dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Pimpinan akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

#### **B. SARAN**

Penyusunan laporan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masih sangat jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan salah satunya karena penyusunan laporan tindak lanjut baru dibuat pertama kali dan belum adanya suatu *outline* yang mengatur tentang hal-hal yang harus dimuat. Maka dari itu, perbaikan mengenai penyusunan laporan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri

pangkalan Balai akan terus dilakukan secara berkala yang mana tentunya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palembang dan pimpinan pada satuan kerja.

# LAMPIRAN

# Publikasi Dokumen Cetak Biru Mahkamah Agung pada Website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

The screenshot shows a web browser window displaying the website 'Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035'. The browser's address bar shows the URL: <https://pn-pangkalanbalai.go.id/index.php/tentang-pengadilan/pengantar/cetak-biru-pembaruan-peradilan-2010-2035>. The website features a navigation menu with links such as 'Beranda', 'Tentang Pengadilan', 'Layanan Publik', 'Layanan Hukum', 'Berita', 'Hubungi Kami', and 'Reformasi Birokrasi'. Below the navigation menu is a row of six service icons: 'Survei', 'Standar Pelayanan', 'E-Court', 'Direktori Putusan', 'Info Perkara', and 'Laporan Kinerja'. The main content area is titled 'Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035' and includes a 'Survey' section with a table of responses, a 'Statistik Pengunjung' section with a visitor count of 01896334, a 'Kegiatan Pengadilan' section with a calendar for December 2022, and a 'Pengaduan Layanan' section with a contact number 082210009901. The website is displayed on a dark-themed background.

**Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035**

[CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035.PDF](#)

**Survey**      **Statistik Pengunjung**      **Kegiatan Pengadilan**      **Pengaduan Layanan**

Berapakah informasi yang tersedia pada website ini?

Kategori	Jumlah
Sangat Baik	180
Baik	7192
Cukup	11042
Buruk	128433
Sangat Buruk	142434
Tidak	142534
Tidak	1194334

01896334

December 2022

Pengaduan Layanan: Publik dapat diadukan melalui nomor dibawah ini

082210009901



# Capture Screen Komdanas dan E-SAKIP

The screenshot shows a web browser window displaying the Komdanas MA-RI website. The browser's address bar shows the URL: [https://komdanas.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1&Itemid=329](https://komdanas.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=329). The website header includes the logo "KOMDANAS MA-RI" and the tagline "Komandan Daerah Mahkamah Agung RI". Below the header, there is a navigation menu with options: "Login/Logout", "Utama", "Pencarian", and "Berita". The main content area is titled "E-SAKIP - KOMPONEN SAKIP TAHUN 2022". A dropdown menu for "Tampilkan" is set to "Tahun 2022". Below this, there is a table with columns for different components of the SAKIP system. The table has a header row with the following categories: "1. PENGADLAN", "2. NEJIRE", "3. BANGKALAN", "4. RASAT", "5. Semesta", and "6. Sektora". Each category has a corresponding "Download" button. The buttons are: "Download I-KIP Tahun 2021", "Download I-IE Tahun 2021", "Download Rencana A&I", "Download I-KI", "Download Rencana O&P&G", "Download Rencana Kinerja", and "Download Perjanjian Kinerja". At the bottom of the page, there is a footer with the text "YOU ARE HERE: HOME > PERENCANAAN > E-SAKIP > DOKUMEN SAKIP" and a "TOP" link.

	L-KIP Tahun 2021	I-IE Tahun 2021	Rencana A&I Tahun 2022	Tahapan Kinerja Utama	Rencana Strategis Tahun 2023-2024	Rencana Kinerja Tahun 2022	Perjanjian Kinerja Tahun
1. PENGADLAN	<a href="#">Download I-KIP Tahun 2021</a>	<a href="#">Download I-IE Tahun 2021</a>	<a href="#">Download Rencana A&amp;I</a>	<a href="#">Download I-KI</a>	<a href="#">Download Rencana O&amp;P&amp;G</a>	<a href="#">Download Rencana Kinerja</a>	<a href="#">Download Perjanjian Kinerja</a>
2. NEJIRE							
3. BANGKALAN							
4. RASAT							
5. Semesta							
6. Sektora							

## Capture Screen Rekap E-Monev Smart DJA DIPA 01

No.	Periode	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu RD (Rp.)	TVRD (volume)	RVRD (volume)	Progres (%)	Keterangan
1	Rekap	100 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit)	100 Layanan Sarana Internal (Unit)	18.000.000	10000	10000	100.00	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: belum ada penyerapan Maret: belum ada penyerapan April: belum ada penyerapan Mei: terserap dan digunakan Juni: sudah terserap Juli: sudah Agustus: Target berupa 2 unit printer telah dilakukan pengadaan barang dan jasa dan telah dilakukan serah terima barang di Bulan Juni 2022 September: Target berupa 2 unit printer telah dilakukan pengadaan barang dan jasa dan telah dilakukan serah terima barang di Bulan Juni 2022 Oktober: Target berupa 2 unit printer telah dilakukan pengadaan barang dan jasa dan telah dilakukan serah terima barang di Bulan Juni 2022 November: Target berupa 2 unit printer telah dilakukan pengadaan barang dan jasa dan telah dilakukan serah terima barang di Bulan Juni 2022 Desember: sudah terserap
2	Rekap	100 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit)	100 Layanan Prasarana Internal (Unit)	4.000.000	10000	10000	100.00	Januari - Februari: - Maret - April: - Mei - Juni - Juli - Agustus: Progress Layanan Prasarana Internal sudah terrealisasi Rp 4.197.300 atau 0,10% dari penyisipan anggaran, 0,10% dari target. Biaya tersebut dipergunakan untuk biaya interpolasi perjalanan ke MA untuk membahas pembangunan gedung baru Kantor Pengadilan Negeri Pangkajene Bala. September: Progress layanan Prasarana Internal di September 2022 perambahannya Rp 70.783.616. Biaya tersebut dipergunakan u/ biaya pembayaran termin I Pembangunan gedung baru Kpd Penyedia Konstruksi Perencana Rp 66.777.600 & biaya lainnya u/ biaya interpolasi perjalanan ke MA u/ membahas pembangunan gedung baru PN Pangkajene Bala senilai Rp 4.000.000. Oktober: Progress layanan prasarana internal untuk Dit 2022 perambahannya Rp 1.183.505.272. Biaya tersebut adalah biaya perjalanan ke Jkt utk Koordinasi ke MA RI perihal gedung baru, biaya honor Polya MA terkait gedung baru, serta juga Pembayaran Uang Muka Kpd Penyedia Fisik CV Andalas Elek terkait Pembangunan Fisik Gedung Baru Kantor PN Pangkajene Bala. November: Progress layanan prasarana internal untuk Nov 2022 perambahannya Rp 102.503.967. Biaya tersebut adalah biaya perjalanan ke Jkt utk ke MA RI & ke PT Nig utk Koordinasi perihal gedung baru, dan Pembayaran Termin ke-2 kpd Penyedia Fisik CV Andalas Elek terkait Pembangunan Fisik Gedung Baru Kantor PN Pangkajene Bala. Desember: sudah terserap

## Capture Screen Rekap E-Monev Smart DJA DIPA 03

No.	Periode	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu RD (Rp.)	TVRD (volume)	RVRD (volume)	Progres (%)	Keterangan
1	Rekap	100 Perkara Pidana yang Disidiosi Pengadilan Distrik Pertama di wilayah Barat (Perkara)	100 Perkara Pidana yang Disidiosi Pengadilan Distrik Pertama di wilayah Barat (Perkara)	112.772.000	100.0000	66.69	66.69	Januari: belum ada serapan Februari: belum ada realisasi Maret: belum ada realisasi April - Mei: terserap Juni: Bulan Juni 2022 perkara pidana yang telah putus pada pengadilan negeri pangkajene bala sebanyak 53 perkara. Dan dari Bulan Januari 2022 s/d Juni 2022 perkara pidana yang telah putus sebanyak 240 perkara terdiri dari pidana biasa, pidana anak, dan pidana singkat. Telah melebihi target capaian Juli: Bulan Juli 2022 perkara pidana yang telah putus pada pengadilan negeri pangkajene bala sebanyak 33 perkara Agustus: Bulan Agustus 2022 perkara pidana yang telah putus pada Pengadilan Negeri Pangkajene Bala sebanyak 43 perkara September: Bulan September 2022 perkara pidana yang telah putus pada pengadilan negeri pangkajene bala sebanyak 14 perkara Oktober: Bulan Oktober 2022 perkara pidana yang telah putus pada Pengadilan Negeri Pangkajene Bala sebanyak 24 perkara November: Bulan November 2022 perkara pidana yang telah putus pada Pengadilan Negeri Pangkajene Bala sebanyak 43 perkara Desember: -
2	Rekap	100 Layanan Bantuan Hukum (Orang)	100 Pos Bantuan Hukum (Orang)	24.000.000	100.0000	100.0000	100.00	Januari: belum ada serapan Februari: belum ada realisasi Maret - April - Mei: terserap Juni: Pengacara pada POS BANTUAN HUKUM telah member ikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan sebanyak 20 jam pada Bulan Juni 2022, dan sebanyak 110 jam dari Bulan Januari 2022 s/d Juni 2022. Juli: Pos Bantuan Hukum (POSDAKUM) telah melayani masyarakat pencari keadilan sebanyak 20 jam pada bulan Juli 2022, dan sebanyak 140 jam dari bulan Januari 2022 s/d Juli 2022. Agustus: Pos Bantuan Hukum (POSDAKUM) telah melayani masyarakat pencari keadilan sebanyak 20 jam pada Bulan Agustus 2022, dan sebanyak 160 jam dari total target 240 jam. September: Pos Bantuan Hukum (POSDAKUM) telah melayani masyarakat pencari keadilan sebanyak 20 jam pada bulan September 2022, dan sebanyak 180 jam dari Bulan Januari 2022-September 2022. Oktober: Pos Bantuan Hukum (POSDAKUM) telah melayani masyarakat pencari keadilan sebanyak 20 jam pada bulan Oktober 2022, dan sebanyak 200 jam dari Bulan Januari 2022 s/d Oktober 2022. November: Pos Bantuan Hukum (POSDAKUM) telah melayani masyarakat pencari keadilan sebanyak 20 jam pada bulan November 2022, dan sebanyak 220 jam dari Bulan Januari 2022 s/d November 2022. Desember: -

# Capture Screen E-SAKIP

The screenshot displays the E-SAKIP REVIU web application interface. The browser's address bar shows the URL <http://www.menpan.go.id/index.php/home>. The application header includes the logo and name "e-SAKIP REVIU" and the user profile "prpangkalanbalai.ma".

The main content area features a table with the following columns: OPD, Renstra, IKU, Renja/RKT, PK, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, and Lainnya. The table lists five entries, all of which have checkmarks in the Renstra, IKU, Renja/RKT, PK, Rencana Aksi, and Laporan Kinerja columns. The "Lainnya" column has a dropdown arrow for each entry.

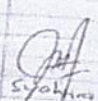
Below the table, it indicates "Showing 1 to 5 of 5 entries (filtered from 936 total entries)".

OPD	Renstra	IKU	Renja/RKT	PK	Rencana Aksi	Laporan Kinerja	Lainnya
PA Pangkalan BUN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PA Pangkalan Kerinci	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PA Pangkalan Balai							
PN Pangkalan BUN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PN Pangkalan Balai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▼



## Bukti Pengiriman Dokumen SAKIP

NO	NOMOR SURAT & TANGGAL SURAT	TUJUAN	TEMBUSAN	PERIHAL SURAT	KET
1	Sur. 100/30/OT.01.21/1000 07 JANUARI 2022	KPT PLO	-	Laporan Pelaksanaan ke Bulan Tahun 2022	10/22 S-2/A
2	Sur. 100/30/OT.01.21/1000 08 JANUARI 2022	KPT PLO	-	Pengiriman Buku Laporan LHASN Produksi Negeri Pajakasi Balai periode 2021	
3	Sur. 100/30/OT.01.21/1000 08 JANUARI 2022	KPT PLO	-	Pengiriman Buku Laporan LHASN Produksi Negeri Pajakasi Balai	
4	Sur. 100/30/OT.01.21/1000 08 JANUARI 2022	KPT PLO	-	Pengiriman Dokumen SAKIP	
5	Sur. 100/30/OT.01.21/1000 08 MARET 2022	Direktorat Jenderal BADILUM Cq Bagian Pe- ngembangan Sistem Informasi pada Biro Kajian dan Hubungan Masyarakat MARI	-	Pembinaan Ruyak Serifikasi Elektronik	
6	Sur. 100/30/OT.01.21/1000 08 MARET 2022	KPT PLO Cq TIM SPP SAMEL	-	Pertemuan Bantuan Ruyak Sara Pengiriman Bertara Candies	
7	Sur. 100/30/OT.01.21/1000 08 MARET 2022	Ketua Biro Perencanaan dan Organisasi MARI	Cq Sekretaris PT Palembang	Usulan Pembelian Anggaran Layanan Listrik PNEB TA 2022	6/2022 4 Darti

NO	NOMOR SURAT & TANGGAL SURAT	TUJUAN	TEMBUSAN	PERIHAL SURAT	KET
16	Wb. 110/850/01.01.1/UM/2022 8 Agustus 2022	Kepala UKPB	Sekretaris PT PLG	dan bangunan PNPKB TA 2022 Usulan Permintaan Penyalangan Pekerja untuk kegiatan Belajar Modal Gedung dan Bangunan (533/11) PNPKB TA 2022	
A	Review Satip w/ 10 m	PT Parlimeny	-	Bau Baru Bau Rongga Bau DKT 2022-2023 Bau 10 m	 Syahid
B	Review Satip				
14	Wb. 110/122561-01-2/XI/2022 22 November 2022	KPK	PT PLG	Pengiriman keturapan surat EKUSA	M
15	Wb. 110/1232/01.02.3 /XI/2022	Direktur Utama SIS	-	Pemahaman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja Intensif pd Gedung Kantor Bau PN. PEB	N
16	Wb. 110/1244/UM.02.3 /XI/2022	- Digns Budekano - Ketua PT. PEG	PT Parlimeny	Pemberitahuan Puan aliansi Samaran aplikasi Sepp Pit Pengusaha New Budget Bch	UH
P	Wb. 110/1233/01.01.1/ XI/2022	Kepala Biro Umum Sekret Kepala UKPB M.A.R.	-	Data Informasi KPA PN. PEB	





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
NOMOR : W6-U10/1/KP.04.6/II/2022**

**TENTANG  
TIM PENYUSUNAN LKJIP /LAPTAH/ IKU/ RENSTRA  
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan ( LAPTAH ), Rencana Strategis ( RENSTRA ), dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah merupakan laporan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan ;
  - b. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan ( LAPTAH ), Rencana Strategis ( RENSTRA ), dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan perubahan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan ( LAPTAH ), Rencana Strategis ( RENSTRA ), dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
  - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan ( LAPTAH ), Rencana Strategis ( RENSTRA ), dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG TIM PENYUSUNAN LKjIP/LAPTAH/IKU/RENSTRA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan ( LAPTAH ), Rencana Strategis ( RENSTRA ), dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- KETIGA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan ( LAPTAH ), Rencana Strategis ( RENSTRA ), dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bertugas menghimpun bahan-bahan tersebut ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 3 Januari 2022


**KETUA**  
**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

  
**SILVI ARJANI, S.H., M.H.**  
NIP. 19760929 200112 2 006

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai  
Nomor : W6-U10/1/KP.04.6/1/2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

No. 1	Nama 2	Jabatan 3	Kedudukan 4	Ket 5
1.	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina	
2.	YUSUF, S.H.	Panitera	Ketua Tim	
3.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Sekretaris	Sekretaris	
4.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota	
5.	A. HAIRUN YULASNI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	
6.	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
7.	M. IMAN SEPTIAN, S.Ip.	Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Anggota	
8.	DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
9.	RAHMAT JUNIANSYAH	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	

KETUA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

  
SILVI ARIANI, S.H., M.H.  
NIP. 19760929 200112 2 006

# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN  
BALAI



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
Jl.HM.Asik Aqil Km.16 Kelurahan Sukajadi  
Telp. 0711-5723669 Fax. 0711-5723912  
Banyu Asin - Sumatera Selatan 30961  
e-mail : pn.pangkalanbalai@gmail.com

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	85
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	75
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak	75



		Tepat Waktu	
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	15

Pangkalan Balai, 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



SILVI ARIANI, S.H., M.H.

NIP. 19760929 200112 2 006

REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
Jl.HM.Asik Aqil Km.16 Kelurahan Sukajadi  
Telp. 0711-5723669 Fax. 0711-5723912  
Banyu Asin - Sumatera Selatan 30961  
e-mail : pn.pangkalanbalai@gmail.com

**REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	0

Pangkalan Balai, 03 Oktober 2022

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



**SILVARIANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19760929 200112 2 006**



DS.9329-0510-3334-5044

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.401909/2022**

**A. Dasar Hukum:**

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
  - Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
  - Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
  - Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
- Sebesar : Rp. 9.319.369.000 ( SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN BELAS JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	9.319.369.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- KPPN S E K A Y U (160) Rp. 9.319.369.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Pemanan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jumlah Uang

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttt.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001



LAMPIRAN  
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2022



DS.9329-0510-3334-5044

Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

WA

Program Dukungan Manajemen

WA.1066

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Rp.

9.319.369.000

WA.1071

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Rp.

5.100.569.000

Rp.

4.218.800.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS.9329-0510-3334-5044

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Program	:	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Halaman : I A. 1
Kegiatan	:	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	9.319.369.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Perolehan Opini WTP	5.100.569.000
		2. 02	Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara	
		3. 03	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	
		4. 04	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.100.569.000
Rincian Output	:	01	EBA.962 Layanan Umum	5.000.000
		02	EBA.994 Layanan Perkantoran	5.095.569.000
Kegiatan	:	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	4.218.800.000
		1. 01	Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.218.800.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	10.000.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	4.208.800.000

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

tid.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP.196705221993031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2022  
I B. SUMBER DANA**



Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi  
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

1. Anggaran Tahun 2022		Rp.	9.319.369.000	Ket :	US\$	Pagu	0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	Ekuivalen Rupiah
1. Rupiah Murni		Rp.	9.319.369.000	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing (2) RPLN	US\$		0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0
2. PNBP		Rp.	0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing (2) RHLN	US\$		0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0
5. Hibah Langsung		Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0
6. SBSN PBS		Rp.	0	f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0 Rp.	0

2. Rincian Pinjaman / Hibah : (dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2022  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9329-0510-3334-5044

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	3.699.977	1.400.592	4.218.800	-	-	9.319.369		
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.699.977	1.400.592	4.218.800	-	-	9.319.369		
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.699.977	1.400.592	-	-	-	5.100.569		
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	3.699.977	1.400.592	-	-	-	5.100.569	11.09	
01	RM	3.699.977	1.400.592	-	-	-	5.100.569	160	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	4.218.800	-	-	4.218.800		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	-	4.218.800	-	-	4.218.800	11.09	
01	RM	-	-	4.218.800	-	-	4.218.800	160	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.699.977</b>	<b>1.400.592</b>	<b>4.218.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.319.369</b>		

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

tttd.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP 196705221993031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2022**

**III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI 4	FEBRUARI 5	MARET 6	APRIL 7	MEI 8	JUNI 9	JULI 10	AGUSTUS 11	SEPTEMBER 12	OKTOBER 13	NOVEMBER 14	DESEMBER 15	
1.	401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	300.828	335.445	487.598	638.669	391.040	402.234	631.250	390.442	463.742	1.525.867	1.779.319	1.972.934	9.319.369
		RENCANA PENARIKAN DANA	269.920	269.920	269.920	500.355	269.920	269.920	500.355	269.920	269.920	269.920	269.920	269.987	3.699.977
		BELANJA PEGAWAI	30.908	65.525	217.678	138.314	121.120	122.314	130.895	116.325	123.039	72.367	93.791	168.316	1.400.592
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	10.000	0	4.197	70.784	1.183.590	1.415.608	1.534.631	4.218.800
		BELANJA MODAL	300.828	335.445	487.598	638.669	391.040	392.234	631.250	386.245	392.959	342.287	363.711	438.303	5.100.569
005.01.WA.1066		Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	269.920	269.920	269.920	500.355	269.920	269.920	500.355	269.920	269.920	269.920	269.920	269.987	3.699.977
		51 BELANJA PEGAWAI	30.908	65.525	217.678	138.314	121.120	122.314	130.895	116.325	123.039	72.367	93.791	168.316	1.400.592
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	10.000	0	4.197	70.784	1.183.590	1.415.608	1.534.631	4.218.800
005.01.WA.1071		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	0	0	0	0	10.000	0	4.197	70.784	1.183.590	1.415.608	1.534.631	4.218.800
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	10.000	0	4.197	70.784	1.183.590	1.415.608	1.534.631	4.218.800

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.

Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP 196705221933031003



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2022  
IV A. B L O K I R



DS 9329-0510-3334-5044

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 196705221993031003

Itd.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2022  
IV B. C A T A N



DS.9329-0510-3334-5044

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 196705221993031003

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi  
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 9,122,156,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			9,122,156,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			4,903,356,000	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan		4,903,356,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1066.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		5,000,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			5,000,000	
A	Penanggulangan Covid-19			5,000,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu )			5,000,000	RM
	- Pengadaan APD/Alat Uji Medis/Rapid Tes/Vitamin/Masker	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,898,356,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,502,764,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,502,764,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.160-Sekayu )			1,570,929,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,328,787,060	1,328,787,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.160-Sekayu )			36,000	RM
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	32,425	32,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,400	2,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.160-Sekayu )			113,041,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	98,649,074	98,649,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,196,400	7,196,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,196,000	7,196,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.160-Sekayu )			32,587,000	RM
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	27,967,254	27,967,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.160-Sekayu )			29,520,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,696,000	24,696,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi  
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 9,122,156,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			1,182,744,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,025,376,000	1,025,376,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			120,897,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	96,457,312	96,457,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			100,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			325,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	325,000,000	325,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			28,010,000	RM
	- Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	14,930,000	14,930,000	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>1,395,592,000</b>	
<b>A</b>	<i>Keperluan Perkantoran Sehari-hari</i>			<i>476,102,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu )			361,257,000	RM
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	3,683,000	44,196,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,683,000	88,392,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	3,348,000	200,880,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	3,683,000	3,683,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	3,683,000	7,366,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	3,348,000	16,740,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu )			75,995,000	RM
	- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (Spandul, Banner, Penjilitan, Plakat, Bingkai)	1.0 THN	75,995,000	75,995,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu )			38,850,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran ( pegawai 30 orang)	30.0 OB	1,295,000	38,850,000	
<b>B</b>	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>402,800,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu )			188,670,000	RM
	- Lisensi Vidio Conference	1.0 THN	2,670,000	2,670,000	
	- Langganan Internet	12.0 BLN	15,500,000	186,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi  
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 9,122,156,000

Halaman: 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu )			11,630,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.160-Sekayu )			184,400,000	RM
	- Langganan Listrik	12.0 BLN	15,366,700	184,400,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu )			9,000,000	RM
	- Langganan telpon	12.0 BLN	750,000	9,000,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.160-Sekayu )			6,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu )			3,100,000	RM
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	3,100,000	3,100,000	
C	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			248,470,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.160-Sekayu )			124,800,000	RM
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2496.0 M2	50,000	124,800,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.160-Sekayu )			123,670,000	RM
	- Tambahan BBM Sewa Roda 4	1.0 UT	18,000,000	18,000,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	3.0 UNIT	25,000,000	75,000,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	5,000	100,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UT	442,500	1,770,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UT	450,000	2,700,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UT	20,000	100,000	
D	<i>Pembayaran Teknis Pelayanan Operasional Kantor</i>			73,240,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu )			25,000,000	RM
	- Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [35 ORG x 1 STEL]	35.0 STEL	600,000	21,000,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi  
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 9,122,156,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.160-Sekayu )			48,240,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNPB [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
E	<b>HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM</b>			<b>136,080,000</b>	
522141	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu )			136,080,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [9 org x 12 bln]	108.0 OB	1,260,000	136,080,000	
F	<b>PENCEGAHAN COVID</b>			<b>5,000,000</b>	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu )			5,000,000	RM
	- Penyemprotan Disinfektan	1.0 KEG	5,000,000	5,000,000	
H	<b>Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding</b>			<b>46,100,000</b>	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu )			5,600,000	RM
	- Swab [4 ORG x 7 KEG]	28.0 OK	200,000	5,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu )			40,500,000	RM
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 10 KEG]	80.0 OH	300,000	24,000,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 10 KEG]	40.0 OK	205,000	8,200,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 10 KEG]	40.0 OH	207,500	8,300,000	
I	<b>Konsultasi, Rekonsiliasi SIMAK, SPM, Revisi Anggaran ke KPPN/KPKNL/KANWIL/DJA</b>			<b>7,800,000</b>	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu )			7,800,000	RM
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KEG]	10.0 OK	80,000	800,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	20.0 OH	300,000	6,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	10.0 OH	100,000	1,000,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			4,218,800,000	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	3.0 Unit		4,218,800,000	
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.0 Unit		10,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			10,000,000	
A	<b>Pengadaan Alat Pengolah Data</b>			<b>10,000,000</b>	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu )			10,000,000	RM
	- Printer	2.0 UNIT	5,000,000	10,000,000	
1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 Unit		4,208,800,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi  
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 9,122,156,000

Halaman : 5

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			4,208,800,000	RM
A	Finishing Gedung dan Sarling Kantor			4,208,800,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu )			4,208,800,000	
	- Fisik	2612.0 m2	1,509,572	3,943,002,000	
	- Perencana	1.0 keg	85,800,000	85,800,000	
	- Pengawas	1.0 keg	100,000,000	100,000,000	
	- Pengelola Kegiatan	1.0 keg	79,998,000	79,998,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Pangkalan Balai, 28 Desember 2022



**ENDANG EFENDI, S.E., M.M.**  
 NIP 198409132009041002

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 136,228,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			136,228,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			136,228,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	259.0 Perkara		112,228,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	259.0 Perkara		112,228,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			27,195,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			27,195,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu )			1,295,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	259.0 PKR	5,000	1,295,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu )			25,900,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	259.0 PKR	100,000	25,900,000	
052	Penetapan hari sidang			22,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			22,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			22,500,000	RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksaan)	300.0 OK	75,000	22,500,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			31,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			31,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			1,000,000	RM
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	50.0 OK	20,000	1,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			30,000,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	300.0 OK	100,000	30,000,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			15,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			15,500,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			1,500,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	50.0 OK	30,000	1,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			14,000,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	200.0 OK	70,000	14,000,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			12,173,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			12,173,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu )			12,173,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	259.0 PKR	47,000	12,173,000	
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			1,810,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,810,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 136,228,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			300,000	
	- Pengiriman Salinan Putusan	10.0 PKR	30,000	300,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			1,510,000	
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	10.0 PKR	75,000	750,000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding	10.0 PKR	76,000	760,000	
<b>058</b>	<b>Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama</b>			<b>2,050,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>2,050,000</b>	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			400,000	
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 PKR	80,000	400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			1,650,000	
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	10.0 PKR	75,000	750,000	
	- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	10.0 PKR	90,000	900,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line] Lokasi: KAB. BANYUASIN	240.0 Orang		24,000,000	
<b>1049.QBA.032</b>	<b>Pos Bantuan Hukum</b>	<b>240.0 Orang</b>		<b>24,000,000</b>	
<b>051</b>	<b>Pos Bantuan Hukum</b>			<b>24,000,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>24,000,000</b>	
522131	Belanja Jasa Konsultansi (KPPN.160-Sekayu )			24,000,000	
	- Honor Advokat Piket [1 ORG x 2 Jam x 10 Hari x 12 BLN	240.0 OJ	100,000	24,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Pangkalan Balai, 28 Desember 2022

  
**Endang Efendi**  
 NIP. 198409132009041002



# PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jalan Perkantoran Pemkab, Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III  
Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan  
Website : [www.pn-pangkalanbalai.go.id](http://www.pn-pangkalanbalai.go.id)  
Telpon/Fax : (0711-5723669)

Lampiran : -

Pangkalan Balai, 26 Desember 2022

Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth.

Tim Penyusun Dokumen SAKIP PN Pangkalan Balai

di -

Tempat

Dengan Hormat

Menindaklanjuti Surat Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: W6-U/4661/OT.01.1/XI/2022 Tanggal 30 November 2022 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Desember 2022

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

## Agenda Rapat :

- Rapat Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SILVI ARIANI, S.H., M.H  
NIP. 19760929 200112 2 006





# PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jalan Perkantoran Pemkab, Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III  
Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan  
Website : [www.pn-pangkalanbalai.go.id](http://www.pn-pangkalanbalai.go.id)  
Telpon/Fax : (0711-5723669)

Hari / Tanggal Rapat	Selasa/ 27 Desember 2022	<b>Keterangan lampiran</b>	
Lokasi Rapat	Ruang Sidang Utama PN Pangkalan Balai	<input checked="" type="checkbox"/>	Daftar hadir
Mulai Waktu Rapat	10.00 WIB	<b>Selesai</b>	11:00 WIB
Pokok Bahasan Rapat	Rapat Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas	<input type="checkbox"/>	Internal memo
Pimpinan Rapat	Silvi Ariani, S.H., M.H.	Beri tanda	<input checked="" type="checkbox"/>
Moderator	-	berikut	
Notulen	M. Iman Septian, S.IP		
<b>BAHASAN MATERI RAPAT</b>			
<b>Peserta Rapat :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tim Penyusun Dokumen SAKIP PN Pangkalan Balai Tahun 2021</li></ul>			
<b>Pokok Bahasan :</b> Pembukaan : Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada pukul 10.00 WIB			
<b>Masalah yang dibahas dalam rapat:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas disusun atas Surat Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor W6-U/4661/OT.01.1/XI/2022 tanggal 30 November 2022 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</li><li>Seluruh rencana aksi tindak lanjut dalam laporan ini akan dimonitoring pelaksanaannya sudah sejauh mana.</li><li>Pencapaian nilai hasil evaluasi akuntabilitas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021 hendaknya tetap dipertahankan di tahun depan. Karena mempertahankan lebih sulit lagi daripada untuk meningkatkan.</li></ul>			
<b>TANDA TANGAN</b>			
<b>DIBUAT NOTULEN</b>	<b>DISAHKAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI</b>		
 M. IMAN SEPTIAN, S.IP NIP. 19850921 201101 1 011	 SILVI ARIANI, S.H., M.H. NIP. 19760925 200112 2 006		



# PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jalan Perkantoran Pemkab, Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III  
Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan  
Website : [www.pn-pangkalanbalai.go.id](http://www.pn-pangkalanbalai.go.id)  
Telpon/Fax : (0711-5723669)

---


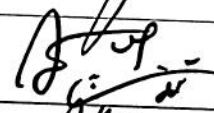

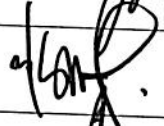



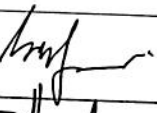
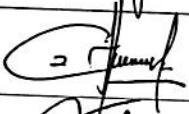
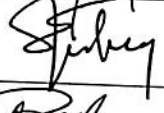






## DOKUMENTASI RAPAT

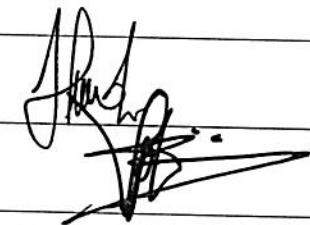

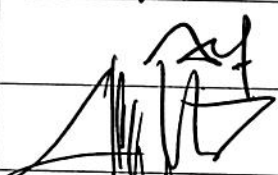

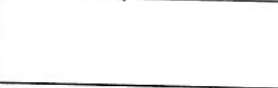




 <p> <b>PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI</b>            Jl.H.M. Asyik Aqil KM. 16 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Banyuasin            pn-pangkalanbalai@gmail.com            pn.pangkalanbalai@gmail.com         </p>	Nomor	:	W6.U10/ /TAPM/MR/DP-A/II/2019
	Tanggal Pembuatan	:	10 Desember 2018
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	02 Januari 2019
	Disahkan oleh	:	KPN Pangkalan Balai
<b>DAFTAR HADIR</b>			

**TANGGAL** : Selasa/27 Desember 2022  
**TEMPAT** : Ruang Sidang Utama PN. Pangkalan Balai  
**AGENDA RAPAT** : Rapat Bulanan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SILVI ARIANI	KPN	
2	Mofita Dwi Wahyuni	WF BU	
3	Emin T.S. Anandus	Hakim	
4	Syhaifa Yana	Hakim	
5	Hani Mukhlisono	Hakim	
6	Wahida Sophie H	Staf	
7	AL IHSAN ALAMSYUR	PP	
8	Isnata Takasari	PP	
9	Yudi Adrian. I	PP	
10	Endang Azhari	Staf	
11	Muhammad Rudi E	Staf	
12	Mathyos Adnata	PP	
13	Wenny Puspita Sari	PP	
14	Melly Norriana	Staf	
15	Dea Anggita	Staf	
16	Eunike Mayenni B	Staf	

17	Hikmahwati	pp	
18	A. HAIRUN Y	Paman Hikmah	
19	M. Iman Syam S	K. Pita	fu
20	Prof B A.	Paman Pul	
21	M. Hidayato	Ja	
22	Ade Kusnawan	Staf RUP	
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			